

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Profil dan Peran SEC Amerika Serikat

Di Amerika Serikat, *Securities and Exchange Commission* (SEC) adalah lembaga independen dari pemerintah federal Amerika Serikat (Congressional Research Service, 2025). Seperti yang dicatat oleh Coffee (2014), SEC tidak hanya beroperasi secara domestik tetapi juga merupakan pemain kunci dalam menjaga integritas dolar sebagai mata uang cadangan dunia dengan memantau instrumen keuangan secara ketat (Gensler, 2022). Signifikansi keberadaan SEC berfungsi untuk menggambarkan bagaimana kekuatan itu digunakan dalam sistem pasar keuangan internasional di dalam dan luar negeri untuk menjaga stabilitas di antara pelaku pasar dan memastikan bahwa mereka beroperasi di bawah aturan yang dirumuskan oleh Washington (Drezner, 2002). Upaya ini untuk meningkatkan profil regulasi bagi sekuritas yang berorientasi pada investor terjadi selama periode sejarah pergolakan dan perubahan ekonomi (U.S. Securities and Exchange Commission, 2023).

Asal-usul SEC tidak dapat dipisahkan dari periode ekonomi global yang merusak ini, yaitu *Great Depression*, setelah pasar saham *Wall Street* jatuh pada Oktober 1929, pada tanggal yang secara umum dikenal sebagai Black Tuesday (Encyclopaedia Britannica, 2025). Pasar modal Amerika Serikat sebelum tahun 1930-an, bagaimanapun, hampir tidak memiliki regulasi dan sebagian besar bersifat sukarela dari bursa, memungkinkan spekulasi liar dan penipuan saham yang mengguncang kepercayaan publik (Parrino et al., 2022). Undang-undang ini

mewajibkan transparansi penuh termasuk menyediakan informasi material sehingga investor dapat mendasarkan investasi pada fakta, dan mencegah segala bentuk penyajian yang salah atau penipuan dalam penjualan sekuritas (U.S. Securities and Exchange Commission, 2018).

Satu tahun kemudian, pemerintah memperkuat kerangka hukum ini dengan mengesahkan *Securities and Exchange Act 1934* (U.S. Securities and Exchange Commission, 2013). Secara formal, undang-undang ini membentuk SEC sebagai regulator independen yang mengawasi pasar sekunder (U.S. Securities and Exchange Commission, 2013). Undang-undang tahun 1934 memberi wewenang kepada SEC untuk mendaftarkan dan mengawasi bursa saham nasional, pialang, dan agen (U.S. Securities and Exchange Commission, 2013). Selain itu, perusahaan publik perlu diwajibkan untuk memberikan laporan berkala agar informasi tersedia dan diperbarui untuk publik (U.S. Securities and Exchange Commission, 2020). Sebagai ketua pertama dengan Joseph P. Kennedy di pucuk pimpinan, *Securities and Exchange Commission* memulai misi untuk memulihkan kepercayaan investor melalui kekuatan penegakan hukum yang kuat (SEC Historical Society, 2005). Sejak saat itu, baik mandat mereka maupun peran SEC sebagai lembaga yang memiliki kekuatan moral dan hukum untuk menetapkan aturan tentang transparansi keuangan global menjadi semakin jelas (Drezner, 2019).

2.1.1 Wewenang dan Fungsi Securities and Exchange Commission

SEC, sebagai lembaga independen dengan otoritas hukum yang luas, memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas sistem keuangan yang telah

ada sejak lama (Su, 2025). Dalam melakukannya, SEC menyelesaikan ini melalui tiga tugas utama yang saling terkait (Su, 2025). Tugas pertama terletak pada melindungi investor (Su, 2025). Dalam hal ini, SEC memiliki wewenang untuk memastikan bahwa setiap orang (atau lembaga) di pasar modal memiliki akses ke informasi yang jujur dan akurat (Su, 2025). SEC mewajibkan perusahaan untuk sepenuhnya mengungkapkan risiko investasi di bawah ketentuan *The Securities Act 1933* (Su, 2025). Pada tahun 2018, SEC menunjukkan bahwa ini dimaksudkan untuk mencegah penipuan dan penyalahgunaan informasi yang dapat merugikan publik (U.S. Securities and Exchange Commission, 2018). Bahwa peran SEC adalah yang menentukan apa yang merupakan sekuritas adalah kunci untuk ini (U.S. Securities and Exchange Commission, 2019). Ini membuat otoritas ini sangat relevan dalam lanskap kontemporer, terutama terkait dengan aset kripto (U.S. Securities and Exchange Commission, 2019).

Fungsi kedua dari lembaga ini adalah untuk memastikan pasar yang adil, teratur, dan efisien (Su, 2025). Dengan mandat yang diberikan oleh *Securities Exchange Act 1934*, mereka memiliki wewenang untuk mengawasi semua pelaku pasar utama, seperti bursa saham, pialang, dan agen investasi (Su, 2025). Mereka menjalankan fungsi pengawasan mereka dengan menetapkan aturan ketat untuk mencegah praktik manipulasi pasar dan perdagangan orang dalam yang dapat merusak integritas sistem keuangan, seperti yang dijelaskan oleh Putnins pada tahun 2022 (Linebaugh et al., 2020). Wewenang ini memungkinkan SEC untuk bertindak sebagai kekuatan polisi pasar dengan kekuatan hukum untuk melakukan investigasi sipil dan menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku yang

melanggar ketentuan, guna memastikan bahwa likuiditas pasar modal Amerika Serikat tetap terjaga sebagai pusat keuangan dunia (Su, 2025).

Peran ketiga SEC adalah membantu perusahaan mengumpulkan dana (Su, 2025). Itu berarti SEC diberi wewenang untuk menetapkan pedoman hukum yang memungkinkan perusahaan mengumpulkan dana dari publik dengan cara yang efisien dan sah (Su, 2025). Namun, SEC tidak hanya berbisnis di sini, tetapi juga menggunakan standar pengumpulan dananya sebagai referensi bagi perusahaan di seluruh dunia (Veneziano, 2019). Dengan mengatur persyaratan bagi perusahaan yang ingin mengakses dana di pasar modal AS, SEC secara tidak langsung memiliki pengaruh signifikan dalam menetapkan standar kepatuhan bagi perusahaan secara global (Veneziano, 2019). Ini berarti SEC adalah regulator yang sangat penting bagi ekonomi global, terutama dalam konteks pengumpulan dana serta kepatuhan perusahaan (Su, 2025). Ketiga bagian operasi ini bergabung untuk menjadikan SEC bukan hanya regulator teknis tetapi juga instrumen kuat yang dapat membentuk aliran modal dan menetapkan norma perilaku dalam sistem keuangan internasional (Su, 2025).

2.1.2 Jangkauan Ekstrateritorial

SEC dalam konteks Hubungan Internasional adalah kemampuan lembaga ini untuk menjalankan wewenangnya di luar wilayah Amerika Serikat (Loonam & Andreoli, 2022). Ini disebut sebagai jangkauan ekstrateritorial (Dodge, 2020). Dalam pengertian hukum, SEC dapat mengatur dan menegakkan hukum serta peraturan untuk kegiatan keuangan perusahaan asing jika kegiatan keuangan tersebut memiliki dampak signifikan pada pasar modal atau investor di Amerika

Serikat (U.S. Securities and Exchange Commission, 2012). Ini berarti bahwa, seperti yang diungkapkan Meyer pada tahun 2020, adalah tanggung jawab SEC untuk memantau, mengawasi, dan mengatur organisasi asing yang terlibat dalam transaksi keuangan yang mempengaruhi baik pasar modal maupun investor AS (Atkins, 2026). Jangkauan ekstrateritorial ini dipertahankan dengan dasar bahwa transaksi yang melibatkan sistem kliring dolar, server internet di Amerika Serikat, atau penggunaan warga negara Amerika Serikat atau Amerika yang bertindak sebagai konsumen sudah cukup untuk memberikan yurisdiksi kepada SEC (ENS, 2012).

Kemampuan ekstrateritorial ini menunjukkan kekuatan struktural Amerika Serikat dalam sistem keuangan global (Strange, 1988). SEC dapat memberikan pengaruh yang cukup besar pada aktor ekonomi asing mana yang bertindak sesuai aturan dengan mengatur akses mereka ke pasar modal terbesar di dunia (Atkins, 2026). SEC dapat menggunakan ancaman sanksi atau dikeluarkan dari ekosistem keuangan global untuk mengendalikan aktor-aktor ini (Farrell & Newman, 2019). Regulasi domestik AS sering kali menjadi standar global, yang berarti perusahaan teknologi keuangan internasional harus mematuhi aturan Washington (Drezner, 2007). Jika tidak, Thompson (2018) menunjukkan bahwa mereka mungkin menghadapi tindakan hukum yang dapat menghentikan operasi mereka (Loonam & Andreoli, 2022). Hal ini menciptakan semacam apa yang disebut seorang profesor sebagai "imperialisme regulasi" di mana perintah hukum dari satu negara melampaui batas-batas wilayah mereka dan mengintervensi kedaulatan negara lain (Johnson, 2014).

Tantangan kedaulatan nasional yang melampaui batas-batas negara, kekuatan SEC menjadi sangat besar bagi negara-negara berkembang seperti El Salvador (Strange, 1988). Ketika El Salvador memutuskan untuk menggunakan Bitcoin sebagai alat pembayaran yang sah, keputusan ini langsung bersinggungan dengan otoritas SEC karena sifat Bitcoin yang tidak terikat oleh batas-batas negara (Prasad, 2021). Setiap perkembangan keuangan baru yang dilakukan oleh El Salvador pasti akan berada di bawah pengawasan SEC, terutama jika perkembangan tersebut dianggap berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan berbasis dolar yang ada (Center for American Progress, 2021). Dengan demikian, jangkauan ekstrateritorial ini bukan hanya masalah teknis hukum tetapi juga instrumen politik yang digunakan oleh Amerika Serikat untuk mendisiplinkan pelaku internasional agar tetap berada dalam koridor sistem moneter global yang mereka kendalikan (Farrell & Newman, 2019).

2.1.3 Sikap SEC Terhadap Aset Kripto

Sikap SEC terhadap aset kripto sangat menarik setelah semua adalah sudut pandang di mana Pemerintah AS mengambil sikap penegakan hukum yang agresif untuk menarik aset kripto seperti Bitcoin ke dalam koridor regulasi kuno kita kembali ke Amerika Serikat (Schulp, 2024). Ini adalah pandangan yang dijalankan SEC sebagai miliknya bahwa teknologi *blockchain* tidak dapat ditutup secara efektif: *blockchain* tidak dapat dihentikan (Atkins, 2025). Namun mereka mengatakan mereka memiliki kemampuan untuk mengawasi tuas kunci yang menghubungkan pasar kontemporer, dan infrastruktur keuangan tradisional (Atkins, 2025). Salah satu metode tersebut adalah menggunakan Tes Howey (U.S.

Securities and Exchange Commission, 2019). Tes Howey adalah standar hukum yang berasal dari Undang-Undang Sekuritas tahun 1933 (Legal Information Institute, 2024). Mereka menggunakan Tes Howey ini untuk melihat apakah aset elektronik memenuhi tes untuk klasifikasi sebagai sekuritas (U.S. Securities and Exchange Commission, 2019). Klasifikasi aset sepihak ini merupakan dasar hukum untuk tindakan SEC terhadap platform perdagangan kripto besar seperti Binance dan Coinbase (Gensler, 2023). Platform-platform ini sering kali merangsang pergerakan harga yang besar di bursa dan secara langsung mempengaruhi nilai aset digital yang dimiliki oleh negara-negara yang menggunakan kripto (Hu & Zhang, 2025).

2.2 Sejarah Ekonomi El Salvador

El Salvador menjadi negara pertama yang mengakui Bitcoin sebagai alat pembayaran resmi atau *Legal Tender* selain Dolar AS yang sudah lama digunakan di negara tersebut (Alvarez et al., 2022). *Legal Tender* adalah metode pembayaran yang sah menurut hukum negara dan diterima oleh otoritas keuangan untuk melakukan transaksi yang tidak hanya berupa uang kertas dan uang logam tetapi juga mencakup metode pembayaran lain seperti cek, giro, dan uang digital. Sejarah El Salvador, terutama dalam bidang keuangan dan pelaksanaan kebijakan moneter, sangat panjang dan rumit sebelum adopsi Dolar AS dan Bitcoin. Pada tahun 1982, mata uang nasional bernama Colón dinamai dari seorang penjelajah Spanyol yang dikenal sebagai Cristóbal Colón, nama Spanyol untuknya, yang juga dikenal sebagai Christopher Columbus menjadi mata uang umum. Ketika pertama kali diperkenalkan, nilai tukar Colón ditetapkan pada 2 Colón sama

dengan 1 Dolar AS atau nilai tukar 1,69 gram emas. Banyak negara meninggalkan sistem standar emas setelah Perang Dunia I, dan itu berdampak signifikan pada stabilitas moneter El Salvador. Namun ketika perang saudara berakhir pada tahun 1992, dengan penandatanganan Perjanjian Damai Chapultepec, situasinya mulai membaik (United Nations, 1992). Presiden Alfredo menunjukkan tanda-tanda pemulihan yang didukung oleh beberapa langkah ekonomi untuk mendorong stabilitas ekonomi (Hidalgo, 2009).

Keputusan El Salvador untuk menghentikan peredaran mata uang Colón terjadi pada tahun 2001 (Boos, 2025). Mereka menerapkan kebijakan dolarisasi dengan mengadopsi Dolar AS sebagai mata uang nasional (Hidalgo, 2009). Ada banyak alasan mengapa keputusan ini diambil, salah satunya adalah untuk tujuan pertumbuhan ekonomi yang mendukung negara tersebut (Towers dan Borzutzky, 2004). Namun demikian, adopsi Dolar AS tidak hanya didasarkan pada pertimbangan makroekonomi, tetapi juga pada kepentingan keuangan yang terlibat dalam keputusan ini (Towers dan Borzutzky, 2004). Kelompok kepentingan politik juga, termasuk Aliansi Republik Nasionalis (ARENA), partai sayap kanan yang berkuasa pada saat itu (Towers dan Borzutzky, 2004).

2.2.1 Ketergantungan Terhadap Remitansi

Ekonomi El Salvador sangat bergantung pada uang yang dikirim oleh warga yang bekerja di luar negeri (International Monetary Fund, 2022). Uang ini dikirim kembali kepada keluarga mereka di El Salvador (International Monetary Fund, 2022). Sektor ini menyumbang sekitar 25% dari pendapatan nasional dan telah menjadi bagian utama dari ekonomi nasional (International Monetary Fund,

2022). Bagi pemerintah El Salvador, remitansi ini sangat penting untuk menjaga stabilitas ekonomi domestik (International Monetary Fund, 2022). Namun, ketergantungan yang besar ini juga membuat ekonomi El Salvador rentan terhadap perubahan dalam sistem keuangan tradisional (International Monetary Fund, 2022).

Pasar tradisional untuk mendistribusikan remitansi dipenuhi dengan masalah sistemik dalam hal biaya dan efisiensi (World Bank, 2021). Sebagai infrastruktur utama untuk aliran remitansi internasional, sistem perbankan lama ini rentan terhadap biaya tinggi dan prosedur yang lambat (Official Monetary and Financial Institutions Forum, 2022). Situasi ini menunjukkan bahwa El Salvador terjebak dalam orbit kekuatan struktural keuangan tradisional yang dikendalikan oleh lembaga-lembaga besar, di mana kemampuan manuver ekonomi negara sangat ditentukan oleh aturan dan biaya yang ditetapkan oleh pihak ketiga (Strange, 1988). Namun, ketidakefisienan ini menjadi beban bagi masyarakat karena bagi orang-orang yang tidak memiliki akses ke perbankan formal, remitansi adalah sumber kehidupan ekonomi (World Bank, 2021).

Dorongan untuk mempromosikan efisiensi ekonomi di sektor pengiriman uang adalah salah satu motivator utama di balik adopsi teknologi *blockchain* dan Bitcoin (Reuters, 2021). Dengan mempertimbangkan pasar modern, pemerintah El Salvador mengejar pendekatan alternatif untuk pembiayaan yang lebih mandiri dan bebas dari saluran perbankan koresponden yang telah beroperasi di bawah bayang-bayang kebijakan moneter AS (Franklin Templeton, 2025). Mereka memiliki kepentingan besar dalam mengurangi biaya transaksi secara dramatis

dan memperluas akses ke layanan keuangan, melalui Bitcoin, jika hanya untuk memperkuat kedaulatan keuangan digital dalam sistem keuangan global yang sangat terpusat (World Bank, 2021).

2.2.2 Penerapan Bitcoin Law

Penerapan Bitcoin Law pada tahun 2021 menandai titik balik bersejarah bagi El Salvador, di mana negara tersebut menjadi yurisdiksi pertama di dunia yang mengakui Bitcoin sebagai alat pembayaran resmi (*legal tender*) berdampingan dengan Dolar AS (Alvarez et al., 2022). Presiden Nayib Bukele telah menjalankan kebijakan, sebagian, untuk merebut kembali sebagian dari kedaulatan keuangan tradisional El Salvador, dan upaya untuk melepaskan diri dari belenggu ekonomi yang diberlakukan oleh struktur kekuasaan keuangan yang mengakar dalam sejarah mereka (Franklin Templeton Digital Assets, 2025). Alasan utama dari pilihan ini adalah optimalisasi ekonomi negara dengan remitansi dari luar negeri (International Monetary Fund, 2022). Remitansi ini menyumbang sekitar seperempat dari pendapatan keseluruhan negara (International Monetary Fund, 2022). Penggunaan teknologi *blockchain*, khususnya, akan memungkinkan pemerintah untuk mengembangkan sistem pendanaan yang lebih mandiri yang kurang bergantung pada keputusan yang dibuat oleh bank sentral Amerika Serikat atau pinjaman dari lembaga keuangan internasional seperti IMF (Franklin Templeton Digital Assets, 2025).

Dalam pelaksanaannya, Bitcoin Law mengharuskan semua pihak yang terlibat dalam ekonomi untuk menerima Bitcoin sebagai salah satu metode pembayaran (Alvarez et al., 2022). Peluncuran infrastruktur digital milik

pemerintah yang disebut Chivo Wallet mendukung inisiatif ini (Nugent, 2021). Dengan melakukan hal tersebut, pemerintah El Salvador berupaya untuk mengubah citra negara guna mempromosikan investasi asing di sektor teknologi dan memperluas akses keuangan bagi orang-orang yang tidak terjangkau oleh sistem perbankan biasa (Nugent, 2021). Namun, pergeseran ke pasar yang lebih modern tidak datang tanpa tantangan teknis besar seperti gangguan dalam sistem aplikasi dan kasus pencurian identitas yang sementara mengurangi kepercayaan publik (Reuters, 2021).

Mengenai dimensi geopolitik, pelaksanaan undang-undang tersebut memicu respons kuat dari komunitas ekonomi global (Reuters, 2021). Para pemodal luar negeri, seperti IMF, telah melakukan tinjauan terhadap Bitcoin, menganggap Bitcoin sebagai ancaman terhadap stabilitas moneter dan keuangan karena risiko pencucian uang (International Monetary Fund, 2022). Dengan tekanan-tekanan ini, peringkat kredit El Salvador dari lembaga-lembaga seperti Fitch dan Moody's diturunkan menjadi "status sampah," yang meningkatkan biaya pinjaman oleh pemberi pinjaman luar negeri secara signifikan (International Monetary Fund, 2022). Namun, ini berarti bahwa struktur keuangan masih ada, di mana ambisi El Salvador untuk berinovasi di pasar digital masih terancam (Strange, 1988). Tetapi kekuatan hegemonik tetap sangat terpusat, mampu mencegah negara-negara kecil memasuki sistem keuangan global arus utama (Strange, 1988).

2.3 Dinamika Hubungan Amerika Serikat dan Kawasan Amerika Latin

Peningkatan baru-baru ini dalam gelombang kepemimpinan di Amerika Latin sering kali dikaitkan dengan kebangkitan kepemimpinan politik kiri di sejumlah lokasi, meskipun ditandai secara tidak merata dan target kebijakan berbeda untuk banyak negara (Americas Society Council of the Americas, 2022). Sebagian besar negara di kawasan ini, tren menuju kebijakan luar negeri yang lebih 'mandiri' melibatkan peningkatan otonomi, pengambilan keputusan independen, dan kepentingan nasional yang diutamakan sejauh yang diinginkan; namun, kebebasan tersebut dibatasi oleh kekhawatiran ekonomi domestik dan pengaturan politik internal serta oleh posisi domestik pemerintah (Congressional Research Service, 2025).

Selain itu, tren ini tercermin dari kesediaan beberapa kekuatan regional untuk memperluas ruang jangkauan politik dan ekonomi mereka melalui pembangunan hubungan yang lebih pragmatis dengan sejumlah mitra sekaligus. Pola ini terkadang diartikan sebagai upaya untuk mempertahankan kelincahan kebijakan, meningkatkan investasi dan perdagangan, serta memperkuat posisi tawar, mengingat konfigurasi global yang berkembang (Brookings Institution, 2023). Dengan kata lain, dinamika baru ini tidak serta merta berarti memutus hubungan dengan AS, melainkan beralih dari apa yang awalnya dianggap sebagai hubungan yang lebih bersifat adversarial dan kurang setara menuju hubungan yang lebih dapat dinegosiasikan dan berbasis kepentingan, lebih terbuka terhadap berbagai opsi kolaborasi (Brookings Institution, 2023).

Pada tingkat pembangunan ekonomi, salah satu faktor yang mungkin mendorong tren perubahan dalam geografi hubungan ini adalah meningkatnya kehadiran kemitraan eksternal di Amerika Latin di luar Amerika Serikat, yang paling terlihat adalah China, yang perannya mencakup perdagangan, pembiayaan, dan investasi. Hal ini juga membuka lebih banyak pilihan bagi setiap negara untuk mendapatkan pasar, pendanaan, dan infrastruktur, membuat diversifikasi mitra ekonomi semakin nyata (Council on Foreign Relations, 2024). Demikian pula, menurut Reuters, nilai perdagangan China dengan negara-negara CELAC (*Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños*) telah melampaui 500 miliar USD pada tahun 2024, dan beberapa program pembiayaan juga muncul (Reuters, 2025). Dalam pengertian yang lebih luas, poin ini menarik perhatian pada fakta bahwa struktur hubungan ekonomi di kawasan ini tidak lagi sepenuhnya terpusat pada satu pusat, dengan negara-negara di kawasan ini memiliki lebih banyak pilihan daripada di masa lalu (Reuters, 2025; Council on Foreign Relations, 2024). Memang benar bahwa konektivitas ekonomi dan strategis Amerika Serikat dan Amerika Latin masih substansial. Menurut ECLAC, Amerika Latin dan Karibia tetap menjadi sekutu strategis bagi AS, bahkan pada tahun 2024, ketika pangsa perdagangan regional dari total perdagangan AS cukup besar (Economic Commission for Latin America and the Caribbean, 2025).

Oleh karena itu, perubahan ini lebih baik dicirikan sebagai reorganisasi hubungan di mana masih ada hubungan yang kuat dengan AS, tetapi negara-negara di seluruh kawasan juga mendiversifikasi mitra dan menemukan mekanisme kerja sama yang dapat dilakukan dengan cara yang mempromosikan kepentingan domestik (Economic Commission for Latin America and the

Caribbean, 2025; Congressional Research Service, 2025). Menanggapi dinamika ini, AS juga membangun kerangka kerja sama yang semakin fokus pada kekhawatiran kontemporer yang berfokus pada integrasi ekonomi dan agenda pembangunan. Contoh umum adalah Kemitraan Amerika untuk Kemakmuran Ekonomi, sebuah inisiatif yang mempromosikan integrasi ekonomi, pengembangan rantai pasokan, pertumbuhan ekonomi digital, dan kemitraan yang berfokus pada masalah keberlanjutan (Pemerintah Kanada, 2024). Aspek ini penting dalam konteks Bab II sebagai pengantar umum pandangan bahwa hubungan Amerika Serikat dan Amerika Latin tidak berakhir dengan tren historis, tetapi bertahan karena evolusi dalam platform dan inisiatif baru, didorong oleh persaingan pengaruh, pembangunan, dan reformasi kebijakan regional (Congressional Research Service, 2025).

Dalam matriks hubungan yang semakin plural ini, beberapa negara mencari pendekatan kebijakan yang dianggap efektif dalam memperluas kapasitas lokal atau mengurangi kendala struktural seperti inovasi sektor keuangan. Melihatnya dalam konteks yang lebih luas, adopsi Bitcoin sebagai alat pembayaran yang sah oleh El Salvador dapat ditempatkan dalam lingkup kawasan yang tetap berakar pada dolar dan jaringan lembaga internasional yang kuat, tetapi juga merasa harus terus mencari opsi kebijakan baru yang akan dianggap sesuai untuk memenuhi kebutuhan domestiknya dan agenda otonomi tertentu (Congressional Research Service, 2025).

2.3.1 Hegemoni Ekonomi dan Dolarisasi di Kawasan Amerika Latin

Hegemoni AS dapat dilihat tercermin dalam status dolar AS sebagai mata uang yang sangat dominan dalam sistem keuangan internasional (International Monetary Fund, 2025). Dominasi ini terwujud dalam cadangan devisa global, transaksi valuta asing, dan pembiayaan lintas batas dengan cara yang memungkinkan dolar menjadi tidak hanya sebagai alat tukar tetapi juga infrastruktur utama untuk perdagangan global dan aliran modal (Bank for International Settlements, 2020).

Bagi kawasan Amerika Latin, posisi dolar penting karena banyak dari apa yang dilakukan kawasan ini secara ekonomi terkait dengan pasar, institusi, dan mekanisme pembayaran berbasis dolar (Congressional Research Service, 2022). Dengan perdagangan, utang luar negeri, dan kebutuhan likuiditas internasional yang sering kali dalam denominasi dolar, kebijakan moneter dan stabilitas makro di sejumlah negara di kawasan ini juga akan dipengaruhi oleh kondisi pasar dolar, arah kebijakan moneter AS, dan persepsi risiko investor global (Congressional Research Service, 2025).

Dolarisasi resmi tidak murah dan memerlukan perubahan kelembagaan dan operasional yang substansial pada sistem, karena negara kehilangan alat kebijakan moneter domestik seperti menetapkan nilai tukar, serta kemampuan untuk menyediakan likuiditas dalam mata uangnya sendiri (Jácome & Lönnberg, 2010). Secara umum, implikasi yang sering disebutkan dalam literatur adalah bahwa stabilitas rezim dolarisasi sangat bergantung pada ketahanan fiskal, kesehatan sektor perbankan, dan keandalan pengawasan keuangan karena

kapasitas bank sentral sebagai penyedia likuiditas darurat terbatas (Jácome & Lönnberg, 2010).

El Salvador sering menjadi pusat perdebatan ini karena konversinya ke dolarisasi resmi mengubah sistem uang domestiknya. IMF mempelajari perubahan rezim ini sebagai salah satu dari sistem nilai tukar tetap ke dolarisasi resmi dengan implikasi bagaimana ekonomi merespons guncangan dan interpretasi hubungan ekonomi dengan Amerika Serikat dalam wacana kebijakan (Swiston, 2011). Secara internasional, poin ini membantu mengkategorikan El Salvador di antara negara-negara dengan keterikatan struktural tinggi terhadap dolar AS (Swiston, 2011). Selain dolarisasi, dolar seringkali terkait dengan remitansi di Amerika Tengah. Remitansi merupakan bagian besar dari PDB sehingga menurut data terbaru yang tersedia (World Bank, 2024), yang terakhir menyumbang sekitar 24% jumlah PDB yang diterima dari luar oleh El Salvador dan tetap demikian karena remitansi internasional. Secara umum, remitansi yang tinggi berfungsi sebagai eksposur keluar ke ekonomi global, sehingga memperkuat hubungan ekonomi bagi negara tuan rumah dengan ekonomi negara migran, dengan penekanan pada AS (World Bank, 2024). Akhirnya, platform pembayaran internasional, sebagai bagian dari struktur dolar, penting karena pembayaran internasional, seperti untuk perdagangan dan remitansi, terhubung dengan jaringan perbankan koresponden.

Seperti yang dicatat BIS (*Bank for International Settlements*), perbankan koresponden memungkinkan bank untuk mengakses layanan di luar batas nasional dan mendukung operasi lintas batas, sementara FSB (*Financial Stability Board*)

mengamati pergeseran dalam hubungan koresponden yang menurun selama periode waktu tertentu sehingga mempertanyakan akses ke pembayaran lintas batas (Bank for International Settlements, 2016). Pada tahap ini, ini ditempatkan sebagai konteks luas di mana akses ke sistem pembayaran lintas batas adalah bagian dari ekosistem keuangan global yang terus sangat dipengaruhi oleh pentingnya dolar (Financial Stability Board, 2017).

2.3.2 Reaksi Kawasan Terhadap Bitcoin Law El Salvador

Dengan mengakui Bitcoin sebagai alat pembayaran yang sah di El Salvador pada tahun 2021, isu ini menarik perhatian karena kebijakan semacam itu terjadi bersamaan dengan dolar AS di El Salvador. Dalam publikasi internasional, tindakan El Salvador seringkali digambarkan sebagai preseden dunia dan mungkin sebagai model untuk mempengaruhi debat kebijakan seputar mata uang digital di Amerika Latin (termasuk legitimasi transaksi dengan kripto & dampaknya terhadap tata kelola ekonomi) (Reuters, 2021). Jawaban umum dari lembaga keuangan internasional adalah tanggapan IMF yang berfokus pada seberapa serius risiko penggunaan *cryptocurrency* sebagai alat pembayaran yang sah. IMF mengakui risiko integritas keuangan dan pasar, stabilitas keuangan, dan perlindungan konsumen dengan kewajiban kontinjensi dalam pernyataan konsultasi resmi Pasal IV (International Monetary Fund, 2022).

Di bidang pembangunan, World Bank juga berperan penting dalam karakterisasi awal kebijakan tersebut. World Bank menolak aplikasi dukungan teknis untuk implementasi Bitcoin dengan alasan yang sama, misalnya, kekhawatiran tentang masalah lingkungan dan transparansi, World Bank masih

terbuka untuk membantu El Salvador dengan hal-hal lain (misalnya, untuk mata uang yang transparan, memastikan prosedur regulasi) (Reuters, 2021).

Pada tingkat kebijakan di Amerika Serikat, perhatian institusional ditunjukkan melalui *Accountability for Cryptocurrency* di El Salvador atau *ACES Act*. Dalam teks undang-undang Kongres AS, diminta agar Kongres AS menyerahkan laporan mengenai adopsi *cryptocurrency* sebagai alat pembayaran yang sah di El Salvador dan beberapa aspek terkait kerangka risiko, tata kelola, dan implikasinya bagi kepentingan AS, karena El Salvador juga menggunakan dolar AS sebagai alat pembayaran yang sah (U.S. Congress, 2022).

Pada skala regional, tanggapan dari negara lain lebih cenderung muncul sebagai wacana dan penyusunan regulasi tentang aset digital dibandingkan dengan mengadopsi status alat pembayaran yang sah seperti El Salvador (International Monetary Fund, 2022). Salah satu kasus yang disebutkan adalah Panama, yang memberlakukan kebijakan rancangan tentang penggunaan aset kripto selama transaksi tertentu, menandakan keinginan untuk menangani konteks regulasi aset digital yang baru muncul, daripada proses alat pembayaran yang sah seperti di El Salvador (Reuters, 2022). Dalam contoh lain, studi Paraguay menyoroti bahwa diskusi saat ini lebih terarah pada pengendalian aset digital (Reuters, 2021) dan alat pembayaran yang sah dianggap tidak dapat diterjemahkan. Isu Bitcoin di El Salvador masih menjadi agenda kebijakan makro dan terkait dengan hubungan lembaga keuangan asing di acara-acara mendatang (International Monetary Fund, 2022). El Salvador sendiri akhirnya mengubah undang-undang Bitcoin pada Januari 2025, sejalan dengan kesepakatan program IMF yang baru, yang

memungkinkan sektor swasta untuk secara sukarela mengadopsi Bitcoin (Reuters, 2025).

El Salvador mengubah undang-undang bitcoin pada Januari 2025, sejalan dengan kesepakatan program IMF baru, memungkinkan sektor swasta untuk secara sukarela mengadopsi Bitcoin (Reuters, 2025). El Salvador tidak berdiri sendiri tetapi merupakan pertukaran interaksi berkelanjutan antara entitas asing, fokus kebijakan Amerika Serikat, dan pendidikan regulasi serta reaksi secara lokal (International Monetary Fund, 2022).

2.4 Cryptocurrency

Cryptocurrency, atau mata uang kripto, adalah aset digital yang menggunakan kriptografi untuk mengamankan transaksi dan mengendalikan penciptaan unit baru. Berbeda dari mata uang konvensional yang dikeluarkan dan diawasi oleh bank sentral suatu negara, *cryptocurrency* beroperasi secara terdesentralisasi melalui jaringan *peer-to-peer* tanpa memerlukan perantara pihak ketiga seperti bank atau lembaga kliring (Nakamoto, 2008). Bitcoin, yang diperkenalkan oleh Satoshi Nakamoto melalui white paper berjudul "*Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System*" pada tahun 2008, merupakan *cryptocurrency* pertama dan hingga kini tetap menjadi yang paling dominan dari segi kapitalisasi pasar. Ide dasar di balik Bitcoin adalah menciptakan sistem pembayaran elektronik yang memungkinkan dua pihak bertransaksi langsung tanpa harus mempercayakan dana mereka kepada institusi finansial mana pun (Nakamoto, 2008).

Teknologi yang mendasari operasional *cryptocurrency* adalah *blockchain*, sebuah buku besar digital terdistribusi yang mencatat seluruh riwayat transaksi secara kronologis dan transparan. Setiap blok dalam rantai berisi sekumpulan data transaksi, sebuah *hash* (semacam sidik jari digital yang unik), dan hash dari blok sebelumnya. Struktur ini membuat manipulasi data menjadi sangat sulit karena mengubah satu blok berarti harus mengubah seluruh rangkaian blok berikutnya secara bersamaan. Validasi transaksi dilakukan oleh jaringan node yang tersebar di seluruh dunia melalui mekanisme konsensus, seperti *Proof of Work* yang digunakan Bitcoin, di mana para penambang (*miners*) bersaing memecahkan teka-teki kriptografi kompleks untuk memverifikasi blok transaksi baru (Noorsanti, 2018). Prinsip desentralisasi inilah yang menjadikan *blockchain* sebagai infrastruktur teknologi yang secara fundamental menantang model keuangan tradisional yang bersifat sentralistik.

Terdapat beberapa karakteristik kunci yang membedakan *cryptocurrency* dari sistem moneter konvensional. Pertama adalah desentralisasi, tidak ada otoritas tunggal yang mengontrol pasokan atau sirkulasi *cryptocurrency*, berbeda dengan mata uang fiat yang peredarannya diatur oleh bank sentral. Yang kedua adalah pseudo anonimitas, meskipun seluruh transaksi tercatat dalam *blockchain* dan bersifat publik, identitas pengirim dan penerima terlindungi di balik alamat kriptografis. Ketiga adalah volatilitas harga: karena tidak memiliki jangkar nilai seperti cadangan emas atau jaminan pemerintah, harga *cryptocurrency* sangat fluktuatif dan dipengaruhi oleh spekulasi pasar, sentimen investor, serta kebijakan regulasi (Prasad, 2021). Keempat adalah sifat lintas batas, *cryptocurrency* dapat ditransaksikan secara global tanpa harus melalui sistem perbankan koresponden

atau mekanisme kliring internasional yang selama ini dikuasai oleh infrastruktur berbasis Dolar AS.

2.4.1 Mekanisme dan Konstruksi Ancaman Cryptocurrency

Persepsi bahwa *cryptocurrency* merupakan ancaman terhadap tatanan keuangan global tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan terbentuk melalui akumulasi beberapa faktor yang saling berkaitan. Dari sisi stabilitas makroekonomi, volatilitas harga yang ekstrem menjadi kekhawatiran utama. Bitcoin, misalnya, pernah mengalami penurunan nilai lebih dari 70% dalam hitungan bulan pada tahun 2022, sebuah tingkat gejolak yang jelas tidak dapat diterima untuk instrumen yang dimaksudkan sebagai alat pembayaran dalam perekonomian sebuah negara. IMF dalam laporan Article IV-nya untuk El Salvador tahun 2022 secara eksplisit menyatakan bahwa adopsi *cryptocurrency* sebagai alat pembayaran sah menimbulkan risiko besar bagi stabilitas keuangan, integritas pasar, dan perlindungan konsumen (International Monetary Fund, 2022).

Dari sisi integritas keuangan, sifat pseudoanonim *cryptocurrency* menimbulkan kekhawatiran serius terkait pencucian uang (*money laundering*) dan pendanaan terorisme (*terrorism financing*). Kemampuan untuk mentransfer nilai dalam jumlah besar melintasi batas negara tanpa pengawasan otoritas keuangan membuat *cryptocurrency* menjadi instrumen yang berpotensi disalahgunakan oleh pelaku kejahatan finansial. Skandal-skandal besar di industri kripto, seperti runtuhnya bursa FTX pada November 2022 yang mengakibatkan hilangnya lebih dari 8 miliar Dolar AS dana nasabah, semakin memperkuat narasi bahwa

ekosistem kripto masih minim perlindungan dan rawan terhadap penipuan (Basel Institute on Governance, 2022).

Dari perspektif geopolitik, *cryptocurrency* dipandang sebagai tantangan langsung terhadap hegemoni Dolar AS dalam sistem keuangan internasional. Ketika sebuah negara mengadopsi Bitcoin sebagai alat pembayaran sah, ia secara implisit menyatakan bahwa ada alternatif yang layak di luar sistem moneter berbasis Dolar. Bagi Amerika Serikat, yang kekuatan globalnya sangat bergantung pada posisi Dolar sebagai mata uang cadangan dunia, langkah semacam ini tidak bisa dianggap sekadar eksperimen teknologi; ia merupakan tantangan politik terhadap fondasi kekuasaan struktural yang telah dibangun sejak sistem Bretton Woods (Strange, 1988).

Stigma terhadap *cryptocurrency* sebagai ancaman dikonstruksi melalui beberapa jalur yang saling memperkuat. Jalur pertama adalah narasi regulasi dari SEC. Ketua SEC Gary Gensler secara berulang kali menggambarkan pasar kripto sebagai “*Wild West*” yang penuh dengan penipuan, skema ilegal, dan penyalahgunaan (Gensler, 2021; 2022; 2023). Dalam kesaksiannya di hadapan Komite Perbankan Senat AS pada September 2021, Gensler menyatakan bahwa pasar kripto “*rife with fraud, scams, and abuse*” dan menegaskan bahwa ruang ini memerlukan regulasi yang setara dengan pasar keuangan tradisional. Penggunaan metafora “*Wild West*” secara konsisten oleh pejabat tertinggi regulator pasar modal AS ini bukan sekadar deskripsi, tetapi merupakan bagian dari proses pembentukan narasi yang mengkonstruksikan *cryptocurrency* sebagai ruang yang berbahaya dan tidak terkendali.

Jalur kedua adalah melalui peringatan dari lembaga multilateral. IMF dan Financial Stability Board (FSB) secara konsisten mengeluarkan laporan yang menekankan risiko sistemik dari *cryptocurrency*. Laporan bersama IMF dan FSB tahun 2023, "*Synthesis Paper: Policies for Crypto Assets*," menyusun kerangka kebijakan yang pada intinya menempatkan aset kripto sebagai sumber kerentanan yang perlu dijinakkan melalui regulasi ketat. Jalur ketiga adalah melalui tindakan lembaga pemeringkat kredit internasional seperti Fitch dan Moody's, yang menurunkan peringkat kredit El Salvador pasca adopsi Bitcoin, sehingga memperkuat stigma bahwa kebijakan kripto identik dengan kecerobohan fiskal. Keseluruhan proses ini mencerminkan apa yang Buzan et al. (1998) gambarkan sebagai sekuritisasi bahwa transformasi suatu isu dari ranah ekonomi biasa menjadi masalah keamanan eksistensial yang membenarkan tindakan luar biasa oleh aktor-aktor hegemonik.